

Moeljarto mengemukakan tentang *Poverty Profile* sebagaimana berikut; Masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam buah alasan antara lain: (a) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (b) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. (c) Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi, emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya. (d) Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (e) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (f) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.²¹

Selanjutnya Supriatna mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain: 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri; 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri; 3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah; 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas; 5. Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.²²

²¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1995), h: 98

²² Tjahya Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h: 125

mereka dan pada saat yang sama mengurangi beban pengeluaran mereka terutama dalam memperoleh pelayanan dasar. Pendapatan dapat ditingkatkan melalui pemberian bantuan sosial atau meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan beban pengeluaran seperti pendidikan, kesehatan, air bersih serta sanitasi, dapat dikurangi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.

Kurang berhasilnya pemerintah dalam mencapai target pengurangan angka kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor. **Pertama**, kesalahan cara pandang pemerintah atas upaya pengentasan kemiskinan. Selama ini pengentasan kemiskinan lebih dipahami sebagai “program pengentasan kemiskinan”, bukan “strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan”. Semua program pengentasan kemiskinan diguyurkan kepada orang miskin secara bersamaan tanpa adanya pentahapan sehingga sulit untuk menilai efektifitas program pengentasan kemiskinan dari tiap klaster. Selain itu program kemiskinan juga tidak melihat “siapa” si orang miskin, akibatnya program pengentasan kemiskinan melalui guyuran dana bantuan juga diberikan pada penduduk miskin yang berada dalam usia produktif yang sebenarnya lebih membutuhkan lapangan pekerjaan daripada program yang lebih bersifat *charity*.

Kedua, kegagalan dalam melakukan pengentasan kemiskinan terjadi karena selama ini pengentasan kemiskinan tidak terintegrasi dengan strategi pembangunan nasional. Seolah strategi pembangunan ekonomi ada pada satu

